



OPTIMALISASI BUMDES DI INDONESIA MELALUI STRATEGI DIGITALISASI, PENGUATAN MODAL SOSIAL, TATA KELOLA KEUANGAN, DAN PERAN PEMERINTAH DESA

Amrie Firmansyah

amriefirmansyah@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

This study aims to explore the challenges and solutions in the management of BUMDes (Village-Owned Enterprises) with a focus on four main categories: digitalization, social capital, financial governance, and the role of village government. A scoping review method was used to analyze 19 relevant articles, identifying various issues faced by BUMDes and providing pertinent policy recommendations. The findings show that the adoption of digital technology in BUMDes is generally low due to limitations in digital literacy and infrastructure in rural areas. Strong social capital, such as trust and local norms, plays a crucial role in enhancing cooperation between BUMDes managers and the community. However, many villages only possess social capital at the bonding stage, which limits the potential for collaboration with external parties. Good financial governance is also key to the success of BUMDes. BUMDes that implement transparent accounting systems and have clear Standard Operating Procedures (SOP) tend to be more capable of sustaining their operations. The active role of village government as a facilitator and supervisor is significant in ensuring the effectiveness of BUMDes management. This study recommends enhancing digital literacy and managerial skills for BUMDes managers through systematic and ongoing training programs. Government agencies overseeing BUMDes are expected to support the development of infrastructure and collaboration among stakeholders in the management of BUMDes.

Keywords: BUMDes, Digitalization, Financial Governance, Social Capital, Village Economy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan solusi dalam pengelolaan BUMDes dengan fokus pada empat kategori utama yaitu digitalisasi, modal sosial, tata kelola keuangan, dan peran pemerintah desa. Metode *scoping review* digunakan untuk menganalisis 19 artikel yang relevan, mengidentifikasi berbagai isu yang dihadapi oleh BUMDes, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital secara umum di BUMDes secara umum masih rendah yang disebabkan oleh keterbatasan literasi digital dan infrastruktur di daerah pedesaan. Modal sosial yang kuat, seperti kepercayaan dan norma lokal, berperan penting dalam meningkatkan kerjasama antar pengelola BUMDes dan masyarakat. Namun, banyak desa hanya memiliki modal sosial pada tahap bonding, yang membatasi potensi kolaborasi dengan pihak eksternal. Tata kelola keuangan yang baik juga menjadi kunci keberhasilan BUMDes. BUMDes yang menerapkan sistem akuntansi yang transparan dan memiliki *Standard Operating Procedures* (SOP) yang jelas cenderung lebih mampu menjaga keberlanjutan usaha. Peran aktif pemerintah desa sebagai fasilitator dan pengawas sangat signifikan dalam memastikan efektivitas pengelolaan BUMDes. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital dan keterampilan manajerial bagi pengelola BUMDes melalui program pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan. Intansi Pemerintah pembina BUMDES diharapkan dapat mendukung pengembangan infrastruktur dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan BUMDes.

Kata kunci: BUMDes, Digitalisasi, Ekonomi Desa, Modal Sosial, Tata Kelola Keuangan

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan revisi kedua dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengubah regulasi pembangunan desa di Indonesia dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengelola sumber daya mereka secara mandiri. Salah satu inisiatif utama dari kebijakan ini adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memberdayakan masyarakat desa secara ekonomi (Achmad & Fadlurrohman, 2023; Aditama et al., 2021). BUMDes diharapkan menjadi penggerak utama kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan usaha-usaha produktif yang relevan dengan potensi lokal desa.

Meskipun pembentukan BUMDes secara masif telah dilakukan di berbagai desa di Indonesia, tantangan utama yang menghambat optimalisasi perannya terletak pada kemampuan manajerial yang terbatas. Aek et al. (2022) dan Amri (2019) menunjukkan bahwa banyak desa,



terutama yang berada di daerah terpencil, masih kekurangan sumber daya manusia dengan keterampilan manajemen bisnis yang memadai. Hal ini menyebabkan BUMDes tidak mampu memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki desa dan dianggap gagal beroperasi secara efisien. Lebih lanjut, modal sosial merupakan elemen penting dalam keberhasilan BUMDes. Agustina et al. (2021) dan Rahayu et al. (2024) menyoroti peran modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, norma, dan jaringan sosial dalam memperkuat kolaborasi antaraktor dalam pengelolaan BUMDes. Namun, banyak desa yang hanya memiliki modal sosial di level internal (*bonding*), sementara keterlibatan aktor eksternal (*bridging*), seperti pemerintah daerah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, masih minim. Modal sosial yang lebih luas diperlukan agar BUMDes dapat berkembang lebih cepat dan stabil.

Digitalisasi juga merupakan tantangan besar bagi BUMDes. Di era digital saat ini, teknologi menawarkan berbagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas akses pasar, namun literasi digital di kalangan pengelola BUMDes masih rendah (Pranajaya et al., 2022; Sanjaya et al., 2020). Keterbatasan ini diperparah dengan minimnya akses ke infrastruktur digital di banyak desa, terutama yang terletak di daerah terpencil (Dina et al., 2020). Padahal, digitalisasi dapat membantu BUMDes memperbaiki sistem manajemen, menciptakan inovasi produk, serta memperluas pasar melalui *platform online*.

Selain itu, tata kelola keuangan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan BUMDes. Fitriani et al. (2024) dan Fitriyanti (2019) menemukan bahwa BUMDes yang memiliki SOP keuangan yang jelas dan transparan cenderung lebih sukses dalam menjaga keberlanjutan operasionalnya. Sayangnya, masih banyak BUMDes yang mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem pelaporan keuangan yang akuntabel. Ketidakmampuan dalam mengelola keuangan dengan baik sering kali memicu masalah kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Peran pemerintah desa juga sangat signifikan dalam memastikan keberhasilan BUMDes. Salmiah et al. (2020, 2021, 2022) menekankan bahwa keterlibatan aktif pemerintah desa, khususnya kepala desa, sebagai fasilitator dan pengawas, sangat penting dalam proses perencanaan dan pengelolaan BUMDes. Pemerintah desa yang proaktif dalam mendukung dan memantau BUMDes cenderung melihat hasil yang lebih positif dalam peningkatan PADes dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam pengelolaan BUMDes. Gunawan (2024) dan Hartati et al. (2023) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat lokal, pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga pendukung eksternal sangat penting dalam mendukung operasional BUMDes. Kolaborasi ini tidak hanya membantu meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes, tetapi juga memperluas akses ke sumber daya yang dibutuhkan, seperti pendanaan, jaringan pasar, dan teknologi.

Meskipun terdapat tantangan yang dihadapi oleh BUMDes, beberapa BUMDes telah berhasil menunjukkan kontribusi positif terhadap ekonomi desa. Alimuddin et al. (2023) dan Danasari et al. (2023) menyoroti bahwa BUMDes yang berfokus pada sektor pariwisata dan pengembangan produk lokal mampu meningkatkan PADes dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti UMKM dan kelompok sadar wisata. Temuan ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tertentu dapat menjadi peluang besar bagi BUMDes selama dikelola dengan baik dan didukung oleh komunitas lokal. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena banyaknya BUMDes yang belum berfungsi optimal disebabkan oleh berbagai masalah struktural, seperti keterbatasan manajemen, kurangnya literasi digital, serta rendahnya tata kelola keuangan (Indra et al., 2022; Indrastuti & Ash-shidiqqi, 2022). Arfiansyah et al. (2022) menambahkan bahwa pelatihan manajerial yang telah dilakukan masih belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kompetensi pengelola BUMDes, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan integratif.



Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi-strategi efektif yang dapat diimplementasikan dalam pengelolaan BUMDes, khususnya dalam modal sosial, adopsi teknologi digital, tata kelola keuangan dan . Penelitian ini menggunakan pendekatan scoping review untuk memetakan tantangan dan solusi yang ada di berbagai literatur terkait BUMDes, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dalam pemetaan penelitian sebelumnya, beberapa studi telah membahas aspek manajerial, modal sosial, digitalisasi, dan tata kelola keuangan secara terpisah. Sanjaya et al. (2020) memfokus pada digitalisasi, sedangkan Fitriani et al. (2024) menyoroti tata kelola keuangan. Penelitian ini berusaha untuk mengintegrasikan beberapa aspek tersebut dalam satu kerangka analisis yang komprehensif, untuk memberikan gambaran yang lebih holistik terkait dengan optimalisasi BUMDes sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik dari sisi literatur maupun kebijakan. Dari segi literatur, penelitian ini memberikan ulasan tentang keempat dimensi utama yaitu modal sosial, digitalisasi, modal sosial, dan tata kelola keuangan dan peran pemerintah desa dapat saling memperkuat dalam konteks pengembangan BUMDes. Sementara itu, bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merancang regulasi yang lebih efektif, termasuk pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital dan manajerial, serta kebijakan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan BUMDes.

KAJIAN PUSTAKA

Modal Sosial

Modal sosial dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berfungsi sebagai elemen penting yang mendukung keberhasilan operasional serta pembangunan ekonomi desa. Menurut Rahayu et al. (2024), modal sosial berperan dalam meningkatkan kepercayaan, kerjasama, dan koordinasi antara pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat. Modal sosial ini mencakup berbagai aspek, termasuk norma-norma sosial, jaringan hubungan, dan kepercayaan antar individu. Modal sosial yang kuat dapat menciptakan iklim kolaboratif yang mendukung kegiatan usaha dan inovasi di tingkat desa.

Namun, di banyak desa, modal sosial sering kali terbatas pada tahap "*bonding*," di mana kerjasama hanya terjadi di dalam kelompok lokal tanpa adanya interaksi dengan pihak eksternal. Untuk memaksimalkan potensi BUMDes, perluasan modal sosial ke tahap "*bridging*" dan "*linking*" sangat diperlukan (Rahayu et al., 2024). Hal ini memungkinkan BUMDes untuk menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal, seperti sektor swasta dan pemerintah daerah. Dengan memperluas jaringan kerjasama, BUMDes dapat mengakses sumber daya yang lebih beragam dan menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi lokal.

Digitalisasi

Digitalisasi memainkan peran penting dalam pengembangan BUMDes, berfungsi sebagai katalisator yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas akses pasar. Sanjaya et al. (2020) dan Sinlae et al. (2023) menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital memiliki potensi besar, adopsi teknologi di banyak BUMDes masih rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital di kalangan pengelola. Banyak BUMDes yang belum memanfaatkan teknologi secara optimal, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Kurangnya akses internet dan keterampilan menggunakan alat digital menjadi penghalang utama bagi BUMDes untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan produktivitas. Faqih & Widya (2023) menekankan bahwa pengenalan aplikasi berbasis teknologi, seperti aplikasi E-Ticket untuk pengelolaan keuangan BUMDes, dapat membantu



meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, implementasinya masih belum merata di seluruh desa. Oleh karena itu, pengembangan digitalisasi menjadi langkah krusial untuk meningkatkan kinerja BUMDes secara keseluruhan, dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga pendidikan.

Tata Kelola Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan faktor kunci dalam tata kelola yang baik bagi BUMDes. Sriyono et al. (2023) menjelaskan bahwa BUMDes yang memiliki sistem keuangan yang transparan dan akuntabel cenderung lebih sukses dalam mencapai target-target ekonomi yang telah ditetapkan. Namun, banyak BUMDes yang masih mengalami kelemahan dalam hal akuntabilitas dan transparansi keuangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya *Standard Operational Procedure* (SOP) keuangan yang jelas, yang sering menyebabkan penyalahgunaan atau pengelolaan dana yang kurang tepat.

Suci et al. (2021) menambahkan bahwa penggunaan alat bantu teknologi, seperti aplikasi *Excel for Accounting* (EFA), dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya SOP yang baik dan penerapan sistem akuntansi yang efisien, BUMDes dapat memperkuat posisi keuangannya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem akuntansi dan pelatihan mengenai tata kelola keuangan yang baik menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan usaha BUMDes.

Peran Pemerintah Desa

Peran pemerintah desa sangat signifikan dalam mendukung pengelolaan BUMDes. Menurut Salmiah et al. (2020, 2021, 2022), keterlibatan aktif pemerintah desa, terutama dalam perencanaan dan pengawasan, memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa BUMDes berjalan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Dukungan dari pemerintah desa tidak hanya mencakup bantuan teknis, tetapi juga dukungan regulasi dan kebijakan yang memperkuat posisi BUMDes di tingkat desa dan kabupaten. Dengan keterlibatan yang kuat dari pemerintah, BUMDes dapat lebih mudah mengatasi tantangan yang dihadapi.

Selanjutnya, kolaborasi antara berbagai aktor juga menjadi aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan BUMDes. Gunawan (2024) menekankan bahwa kerjasama antara masyarakat desa, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan eksternal sangat diperlukan untuk memperkuat keberlanjutan BUMDes. Kolaborasi lintas sektor ini dapat membuka akses terhadap jaringan pasar yang lebih luas, sumber pendanaan tambahan, serta peningkatan kapasitas manajerial dan teknis bagi pengelola BUMDes. Dukungan yang baik dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan sangat berkontribusi pada keberhasilan dan pengembangan BUMDes.

Faktor-Faktor Yang Mendukung Lainnya

Tantangan literasi manajerial di kalangan pengelola BUMDes juga perlu diperhatikan. Achmad & Fadlurrohman (2023) dan Aditama et al. (2021) menyimpulkan bahwa banyak pengelola BUMDes belum memiliki keterampilan manajerial yang memadai untuk menjalankan usaha yang kompleks. Kurangnya pemahaman tentang strategi bisnis, pemasaran, dan manajemen risiko sering kali menghambat kinerja BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan mencapai keberlanjutan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan manajerial yang lebih terfokus dan sistematis sangat diperlukan.

Peningkatan literasi manajerial dapat dilakukan melalui program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pelatihan ini tidak hanya harus mencakup keterampilan dasar manajerial tetapi juga pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, pemasaran digital, dan inovasi produk. Dengan meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes, diharapkan mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik, mengelola sumber daya dengan efisien, dan menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks.



Selanjutnya, struktur regulasi dan kebijakan pemerintah memiliki dampak besar terhadap keberhasilan BUMDes. Alimuddin et al. (2023) menunjukkan bahwa beberapa regulasi yang terkait dengan pengelolaan BUMDes masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal pengawasan keuangan dan transparansi. Kebijakan yang lebih ketat mengenai audit keuangan dan pelaporan dapat membantu meningkatkan akuntabilitas BUMDes serta memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Regulasi yang jelas dan komprehensif akan menciptakan landasan yang kuat untuk pengelolaan yang efektif.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya juga penting untuk menciptakan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan BUMDes. Diskusi antara pemerintah dan pengelola BUMDes dapat membantu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta menemukan solusi yang tepat. Dengan adanya regulasi yang baik dan dukungan dari pemerintah, BUMDes diharapkan dapat beroperasi lebih efisien dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Keberhasilan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Falimu et al. (2023) dan Fitriani et al. (2024) menekankan bahwa pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan kompetensi pengelola BUMDes sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka secara efektif. Kurangnya pelatihan dan pembinaan manajerial sering kali menyebabkan BUMDes tidak mampu menghadapi tantangan-tantangan bisnis yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan BUMDes.

Pelatihan harus mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen dasar hingga keterampilan teknis yang lebih spesifik. Program pelatihan yang dirancang dengan baik akan memberikan pengelola BUMDes keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha secara efisien, mengembangkan strategi pemasaran, serta melakukan analisis pasar. Dengan meningkatkan kompetensi pengelola, BUMDes akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

Pengelolaan aset desa merupakan aspek penting dalam keberhasilan BUMDes. Iskandar et al. (2021) menyatakan bahwa beberapa BUMDes mengalami kesulitan dalam memanfaatkan aset desa secara optimal karena keterbatasan modal dan kemampuan teknis. Pengelolaan aset yang baik dapat membantu BUMDes meningkatkan produktivitas dan kontribusi terhadap PADes. Namun, hal ini memerlukan perencanaan yang matang dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

Pemerintah daerah berperan penting dalam memberikan dukungan teknis dan sumber daya untuk membantu BUMDes dalam pengelolaan aset. Program-program yang mendukung pengembangan infrastruktur dan akses terhadap pelatihan manajemen aset akan sangat bermanfaat bagi BUMDes. Dengan perencanaan yang baik dan dukungan yang memadai, BUMDes dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset desa dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Meskipun banyak tantangan yang dihadapi oleh BUMDes, potensi mereka sebagai instrumen pembangunan desa masih sangat besar. Maq et al. (2024) menyimpulkan bahwa dengan dukungan regulasi yang tepat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan adopsi teknologi digital, BUMDes dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi desa di Indonesia. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia, BUMDes dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan pengelolaan sumber daya lokal secara optimal.



METODE

Penelitian ini menggunakan metode *scoping review* yang dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia, mengingat pentingnya BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa. Metode ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi berbagai tema yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes, seperti digitalisasi, modal sosial, tata kelola keuangan, dan peran pemerintah desa. Artikel yang dikaji mencakup penelitian serta hasil pengabdian masyarakat yang relevan dengan topik ini.

Proses pengumpulan literatur dilakukan dengan menggunakan perangkat *Publish or Perish*, yang memungkinkan penulis mengakses artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari berbagai jurnal nasional dan jurnal internasional. Kata kunci yang digunakan mencakup "BUMDes", "pengelolaan desa", "digitalisasi BUMDes", "modal sosial", dan "tata kelola keuangan" baik dengan menggunakan istilah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dari hasil pencarian, tahap awal penyaringan berdasarkan relevansi dengan topik penelitian ini, sebanyak 132 artikel dipilih untuk dianalisis lebih lanjut. Tahap penyaringan dilakukan dengan menetapkan kriteria yang jelas, yaitu artikel yang berfokus pada pengelolaan BUMDes, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang diusulkan. Dari 132 artikel yang lolos, penulis mengelompokkan artikel tersebut berdasarkan topik utama yang mencakup digitalisasi, modal sosial, tata kelola keuangan, dan peran pemerintah desa.

Pada tahap selanjutnya, dilakukan analisis tematik terhadap artikel yang telah dikelompokkan. Penulis mengidentifikasi tren dan pola dari literatur yang tersedia, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kinerja BUMDes. Selain itu, rekomendasi kebijakan yang diusulkan oleh artikel penelitian dan artikel hasil pengabdian kepada masyarakat yang dikaji juga dianalisis untuk memberikan masukan yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam memperbaiki pengelolaan BUMDes di Indonesia. Jumlah artikel final yang digunakan dalam penelitian berjumlah 19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis 19 artikel yang terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia. Hasil analisis ini mengidentifikasi beberapa temuan utama yang dibagi menjadi empat kategori yaitu digitalisasi, modal sosial, tata kelola keuangan, dan peran pemerintah desa. Terkait dengan digitalisasi, banyak artikel menyoroti bahwa adopsi teknologi di BUMDes masih rendah. Misalnya, penelitian oleh Sanjaya et al. (2020) dan Sinlae et al. (2023) menunjukkan bahwa mayoritas BUMDes belum menggunakan teknologi digital secara optimal untuk meningkatkan efisiensi operasional. Hambatan utama yang ditemukan adalah rendahnya literasi digital di kalangan pengelola BUMDes dan keterbatasan infrastruktur teknologi di desa-desa. Artikel oleh Faqih & Widya (2023) menambahkan bahwa penggunaan aplikasi berbasis teknologi, seperti aplikasi *e-ticket* untuk pengelolaan keuangan BUMDes, mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun implementasinya masih belum merata. Oleh karena itu, pengembangan digitalisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kinerja BUMDes secara keseluruhan.

Modal sosial juga memainkan peran penting dalam kesuksesan BUMDes. Rahayu et al. (2024) menemukan bahwa modal sosial yang kuat, seperti kepercayaan dan norma-norma lokal, dapat meningkatkan kerjasama antara pengelola BUMDes dan masyarakat. Namun, modal sosial di banyak desa masih terbatas pada tahap *bonding*, di mana interaksi sosial hanya terjadi dalam kelompok internal, belum pada tingkat *bridging* dan *linking* yang lebih luas untuk memperluas jejaring dan potensi kerja sama eksternal.



Temuan terkait tata kelola keuangan menunjukkan bahwa banyak BUMDes masih memiliki kelemahan dalam hal akuntabilitas dan transparansi keuangan. Fitriani et al. (2024), dan Fitriyanti (2019) menemukan bahwa BUMDes yang memiliki sistem akuntansi yang baik cenderung lebih mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan menjaga keberlanjutan usaha. Di sisi lain, penelitian oleh Sriyono et al. (2023) menyoroti bahwa banyak BUMDes masih belum memiliki SOP yang baik, terutama dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan, sehingga menyebabkan rendahnya akuntabilitas keuangan.

Peran pemerintah desa dalam keberhasilan BUMDes sangat signifikan. Salmiah et al. (2020, 2021, 2022) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah desa, baik sebagai fasilitator maupun pengawas, sangat penting dalam mendukung kinerja BUMDes. Desa-desa yang memiliki dukungan kuat dari pemerintah desa cenderung memiliki BUMDes yang lebih berhasil dalam mengembangkan potensi ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kolaborasi antara BUMDes dengan masyarakat, pemerintah lokal, dan pihak eksternal sangat penting. Gunawan (2024) menegaskan bahwa kerjasama antara para pemangku kepentingan membantu BUMDes mengakses pasar yang lebih luas, mendapatkan pendanaan yang lebih baik, serta meningkatkan kapasitas manajerial pengelola BUMDes. Namun, kendala utama yang dihadapi oleh banyak BUMDes adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan BUMDes. Darmawan et al. (2022) dan Haekase et al. (2020) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat yang rendah sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap tujuan dan manfaat BUMDes.

Aspek literasi manajerial juga ditemukan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja BUMDes. Aditama et al. (2021) dan Arfiansyah et al. (2023) mengidentifikasi bahwa banyak pengelola BUMDes yang masih belum memiliki keterampilan manajerial yang memadai, baik dalam hal perencanaan, pengelolaan sumber daya, maupun pengambilan keputusan strategis. Hal ini mengakibatkan banyak BUMDes yang tidak mampu beroperasi secara optimal dan sering kali terjebak dalam masalah operasional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa BUMDes yang didukung oleh inisiatif pengembangan kapasitas, seperti pelatihan manajemen dan literasi digital, memiliki performa yang lebih baik. Misalnya, Alimuddin et al. (2023) dan Eikman & Vinuzia (2020) menemukan bahwa pelatihan digital marketing mampu meningkatkan daya saing produk-produk BUMDes di pasar lokal, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan PADes.

Selanjutnya, peran regulasi dalam pengelolaan BUMDes juga menjadi sorotan. Beberapa artikel seperti yang disampaikan oleh Indrastuti & Ash-shidiqqi (2022) dan Karyana (2023) menunjukkan bahwa kebijakan yang jelas dari pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mendorong implementasi SOP keuangan yang baik serta mendorong adopsi teknologi di BUMDes. Dengan demikian, hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan secara menyeluruh dalam pengelolaan BUMDes, di mana faktor-faktor seperti literasi digital, modal sosial, tata kelola keuangan, dan peran pemerintah desa harus ditingkatkan secara bersamaan. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antaraktor dan dukungan regulasi yang kuat untuk mendukung perkembangan BUMDes di Indonesia secara berkelanjutan.

Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah rendahnya tingkat adopsi digitalisasi. Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Sanjaya et al. (2020) dan Sinlae et al. (2023), yang menegaskan bahwa literasi digital yang rendah di kalangan pengelola BUMDes serta keterbatasan infrastruktur digital di daerah pedesaan menjadi hambatan signifikan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pengelolaan BUMDes. Dengan potensi besar



penggunaan teknologi digital, banyak BUMDes masih tertinggal dalam penerapannya. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan literasi digital agar pengelola BUMDes dapat memanfaatkan teknologi untuk efisiensi operasional dan perluasan akses pasar.

Selain itu, literasi digital yang rendah tidak hanya berdampak pada operasionalisasi BUMDes, tetapi juga pada akses ke pasar yang lebih luas. Eikman & Vinuzia (2020) mengungkapkan bahwa pelatihan pemasaran digital dapat menjadi kunci dalam memperluas jangkauan produk BUMDes di pasar lokal maupun nasional. Namun, tanpa infrastruktur yang memadai dan kemampuan digital yang cukup, BUMDes akan terus menghadapi tantangan dalam memanfaatkan peluang pasar digital yang ada.

Modal sosial juga memegang peranan penting dalam keberhasilan BUMDes. Rahayu et al. (2024) menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat, seperti kepercayaan dan norma-norma lokal, dapat memperkuat kolaborasi antara pengelola BUMDes dan masyarakat. Sayangnya, modal sosial di banyak desa masih terbatas pada tahap bonding, di mana interaksi sosial hanya terjadi dalam kelompok internal. Untuk mencapai pengembangan yang lebih luas, diperlukan peningkatan modal sosial ke level *bridging* dan *linking* yang dapat memperluas hubungan eksternal, termasuk dengan pasar dan mitra bisnis di luar desa.

Penelitian ini menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang baik dalam menjaga keberlanjutan BUMDes. Fitriani et al. (2024) dan Fitriyanti (2019) menunjukkan bahwa BUMDes yang memiliki sistem akuntansi yang kuat dan laporan keuangan yang transparan lebih mampu mempertahankan kelangsungan usaha dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, banyak BUMDes yang masih mengalami kesulitan dalam menerapkan standar akuntansi yang memadai, terutama dalam pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan. Pentingnya SOP yang jelas dalam pengelolaan keuangan juga disampaikan oleh Sriyono et al. (2023), yang menyatakan bahwa SOP keuangan yang baik dapat menjadi panduan bagi pengelola BUMDes dalam mengelola dana dengan lebih efisien dan transparan.

Peran pemerintah desa dalam keberhasilan BUMDes sangat signifikan. Salmiah et al. (2020, 2021, 2022) menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam perencanaan, pengawasan, dan pengembangan BUMDes dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes. Desa-desa yang memiliki dukungan kuat dari pemerintah desa cenderung lebih berhasil dalam mendorong BUMDes untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian desa.

Kolaborasi antara BUMDes, masyarakat, pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan eksternal juga menjadi kunci keberhasilan. Gunawan (2024) menyoroti bahwa kerjasama antara pemangku kepentingan membantu BUMDes mengakses pasar yang lebih luas, mendapatkan pendanaan yang lebih baik, serta meningkatkan kapasitas manajerial pengelola BUMDes. Namun, partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan BUMDes masih rendah, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap tujuan dan manfaat BUMDes, sebagaimana diungkapkan oleh Darmawan et al. (2022) dan Haekase et al. (2020).

Selain partisipasi masyarakat, keterampilan manajerial pengelola BUMDes juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan. Aditama et al. (2021) dan Alimuddin et al. (2023) menegaskan bahwa keterampilan manajerial yang terbatas sering kali menjadi hambatan bagi pengelola BUMDes dalam melakukan perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, pelatihan manajerial yang efektif menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes.

Pelatihan manajerial yang disertai dengan pendampingan langsung, seperti yang ditunjukkan oleh Arfiansyah et al. (2022, 2023), dapat meningkatkan kualitas manajemen BUMDes. Pelatihan ini penting untuk membekali pengelola BUMDes dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan operasional dan strategis yang kompleks. Literasi keuangan juga merupakan salah satu aspek penting yang perlu ditingkatkan.



Fitriani et al. (2024), dan Fitriyanti (2019) menyatakan bahwa banyak pengelola BUMDes yang belum memiliki keterampilan dasar dalam mengelola keuangan dengan baik. Kondisi ini menyebabkan banyak BUMDes mengalami kesulitan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan usaha.

Dalam konteks kebijakan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi terkait BUMDes perlu lebih fokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital. Indrastuti & Ash-shidiqqi (2022) dan Karyana (2023) menekankan bahwa kebijakan yang ada saat ini masih belum cukup untuk mendorong adopsi teknologi digital di BUMDes. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik untuk mempercepat digitalisasi BUMDes, terutama di desa-desa yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur teknologi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap pengelolaan BUMDes. Evaluasi berkala yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat, dan pihak eksternal dapat membantu mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari solusi yang tepat. Kolaborasi dalam evaluasi ini juga dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengelolaan BUMDes, seperti yang diusulkan oleh Gunawan (2024).

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia, dengan memfokuskan pada empat kategori utama yaitu digitalisasi, modal sosial, tata kelola keuangan, dan peran pemerintah desa. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat adopsi teknologi digital di BUMDes menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh BUMDes maupun pemangku kepentingan terkait. Meskipun terdapat potensi besar untuk meningkatkan efisiensi operasional, banyak BUMDes yang masih belum memanfaatkan teknologi dengan optimal, terutama karena rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur di daerah pedesaan. Modal sosial juga terbukti memainkan peranan penting dalam kesuksesan BUMDes. Modal sosial yang kuat, seperti kepercayaan dan norma-norma lokal, dapat meningkatkan kerjasama antara pengelola BUMDes dan masyarakat. Namun, banyak desa masih berada pada tahap *bonding*, yang membatasi kemampuan untuk menjalin jejaring yang lebih luas dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan modal sosial ke tingkat *bridging* dan *linking* untuk memaksimalkan potensi BUMDes.

Dari segi tata kelola keuangan, BUMDes yang memiliki sistem akuntansi yang baik dan transparan cenderung lebih mampu menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pentingnya SOP dalam pengelolaan keuangan sering kali masih kurang diterapkan di banyak BUMDes. Kondisi ini menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan transparansi, yang merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan BUMDes. Peran pemerintah desa juga sangat signifikan dalam mendukung kinerja BUMDes. Keterlibatan aktif pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai fasilitator dan pengawas dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes. Dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan BUMDes dapat berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Meskipun 19 artikel digunakan sebagai dasar analisis penelitian, variasi dalam metodologi dan konteks ulasan dapat mempengaruhi generalisasi hasil. Beberapa artikel mungkin memiliki fokus yang berbeda, sehingga tidak semua temuan dapat diaplikasikan secara langsung ke semua BUMDes. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada literatur yang tersedia dan mungkin tidak mencakup semua ulasan atau data terbaru terkait pengelolaan BUMDes.



Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan yang lebih mendalam untuk memperoleh data primer dari pengelola BUMDes dan pemangku kepentingan terkait. Pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam atau kelompok diskusi terfokus dapat memberikan ulasan yang lebih komprehensif tentang tantangan dan praktik terbaik yang dihadapi BUMDes. Selain itu, penelitian dengan menggunakan data longitudinal dapat membantu menganalisis perkembangan BUMDes dari waktu ke waktu.

Intansi Pemerintah Pembina BUMDES disarankan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung peningkatan literasi digital di kalangan pengelola BUMDes. Program pelatihan yang sistematis dan terstruktur perlu dilakukan untuk memberikan keterampilan teknologi informasi yang diperlukan. Selain itu, Intansi Pemerintah Pembina BUMDES juga perlu memperkuat infrastruktur teknologi di desa-desa untuk mendukung adopsi digitalisasi yang lebih luas di BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W., & Fadlurrohm, I. (2023). The role of BUMDes in community empowerment in Salamjaya Village, Pabuaran District, Subang Regency. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(2), 935–940. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4640/http>
- Aditama, N. P., Winarto, A. E., & Firmansyah, F. (2021). Pengabdian kepada masyarakat melalui revitalisasi BUMDES sebagai layanan sosial pada Bamuju Bamara Desa Sungai Tabuk. *Abdimas: Adi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 41–53. <https://doi.org/10.34306/adimas.v1i2.431>
- Aek, K. R., Silva, Y. O. da, Carcia, M. S. M., Muda, V. A., & Onci, O. N. (2022). Pengelolaan dan peran BUMDes Melati Dewa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Wolonwalu Kecamatan Bola Kabupaten Sikka Kristiana. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(6), 3842–3856. <https://doi.org/10.37385/msej.v3i6.1183>
- Agustina, T., Nurdin, M., Suryani, S., Jatmika, D., Anisa, N., Puteri, A. H., Nur, S., Zaini, M., & Ardianto, Y. A. (2021). Penguatan jiwa kewirausahaan melalui kesadaran potensi diri anggota Bumdes berkah bersama Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. *Indonesian Collaboration Journal of Community Services*, 1(3), 77–89. <https://doi.org/10.53067/icjcs.v1i3.11>
- Alimuddin, H., Abdullah, A., & Razak, F. (2023). Pelatihan digital marketing untuk meningkatkan daya saing produk badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal IPMAS*, 3(3), 174–182. <https://doi.org/10.54065/ipmas.3.3.2023.361>
- Amri, K. (2019). Bumdes acceleration towards Mandiri village. *IAPA Proceedings Conference*, 6, 268–281. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.236>
- Arfiansyah, Z., Qadri, R. A., & Firmansyah, A. (2022). Pendampingan pelaporan keuangan pada pengurus BUMDes di Kabupaten Pacitan. *Pengmasku*, 2(2), 186–193. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v2i2.307>
- Arfiansyah, Z., Qadri, R. A., & Firmansyah, A. (2023). Peningkatan kapasitas pengurus BUMDes di Kabupaten Pacitan terkait dengan perencanaan bisnis. *Pengmasku*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v3i1.303>
- Danasari, F., Mulyawati, S., Selvia, S. I., Wirastika, N. M., Rika, B., & Febrilia, A. (2023). Sosialisasi peran dan fungsi BUMDES dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat melalui potensi Desa Wisata Tetebatu. *Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 5(2), 297–303. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v5i2.1164>
- Darmawan, A., Alamsyah, R., Koswara, R., & Ahmadi, D. (2022). Strengthen the role of village owned enterprises (BUMDes) to improve social welfare and reduce inequality in rural areas: lesson from Indonesia. *The 3rd International Conference of Business, Accounting,*



- and Economics, 1–10. <https://doi.org/10.4108/eai.10-8-2022.2320874>
- Dina, N. Z., Firdaus, A. A., & Yunardi, R. T. (2020). Pelatihan pembuatan website menggunakan elementor pada produk Bumdes Banjarworo, Kabupaten Tuban sebagai sarana promosi. *Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 24–30. <https://doi.org/10.47747/pengabdiankepadamasyarakat.v1i1.109>
- Eikman, A., & Vinuzia, M. (2020). Peran badan usaha milik desa (Bumdes) terhadap kesejahteraan masyarakat di DesaTua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(3), 343–352. <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i3.1228>
- Falimu, F., Aimang, H. A., & Lamadang, K. P. (2023). Peningkatan Bumdes berdasarkan aspek metodologi melalui PKM. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 137–143. <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i1.2505>
- Faqih, A. R., & Widya, A. A. (2023). Implementasi aplikasi e-ticket pada Bumdes Desa Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang sebagai solusi digitalisasi pengelolaan tiket. *Jurnal Sistem Informasi, Teknik Informatika Dan Teknologi Pendidikan*, 2(2), 49–54. <https://doi.org/10.55338/justikpen.v2i2.30>
- Fitriani, D., Md Shahbudin, A. S., & Shauki, E. R. (2024). Exploring BUMDES accountability: Balancing expectations and reality. *Cogent Business and Management*, 11(1), 1–26. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2402083>
- Fitriyanti, S. (2019). Analisis potensi pembentukan badan usaha milik desa (Bumdes) berbasis kearifan lokal di Desa Hiyung Kabupaten Tapin. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(1), 55–62. <https://jkpjurnal.com/index.php/menu/article/view/0000-0003-0715-4777>
- Gunawan, R. (2024). Exploration of the principle of accountability in the management of village-owned enterprises (BUMDes). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 219–224. <https://ip2i.org/jip/index.php/ema/article/view/99%0Ahttps://ip2i.org/jip/index.php/ema/article/download/99/184>
- Haekase, Y. E., Nursalam, N., & Toda, H. (2020). The effectiveness Village-Owned Enterprises (BUMDes) Sehati in Nekmese Village Amarasi Sub-District, South Kupang Regency. *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship*, 1(3), 217–230. <https://doi.org/10.35912/joste.v1i3.277>
- Hartati, P., Amirullah, M., & Munandar, E. (2023). Peran badan usaha milik desa (Bumdes) kompromi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Bojongkondang Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, 2(4), 610–620. <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i4.963>
- Indra, I. M., Novika, F., Wahyuari, W., Robidi, R., & Septivani, N. (2022). Rural socio entrepreneur through village-owned enterprises (BUMDes) in Tegalwaru Bogor. *International Journal of Economy, Education and Entrepreneurship (IJE3)*, 2(2), 415–421. <https://doi.org/10.53067/ije3.v2i2.81>
- Indrastuti, L., & Ash-shidiqqi, E. A. (2022). Revitalisasi kelembagaan Bumdes dalam upaya meningkatkan kemandirian dan ketahanan desa. *El Wasathiya*, 10(1), 125–139. <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v10i01.4663>
- Iskandar, J., Engkus, E., Fadjar Tri Sakti, Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). Strategi pengembangan badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 1–11. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.1>
- Karyana, Y. (2023). Inovasi pemberdayaan BUMDes sebagai simpul penggerak ekonomi masyarakat desa. *Populika*, 11(1), 41–49. <https://doi.org/10.37631/populika.v11i1.731>
- Maq, M. M., Dewi, S. P., & Suningrat, N. (2024). Pendampingan balai desa dalam



- mengembangkan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. *Journal of Human And Education*, 4(5), 185–191. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i5.1439>
- Pranajaya, K. A., Sakir, S., & Prasetyo, S. I. (2022). Digitizing BUMDes: application, opportunities, and challenges in the Special Region of Yogyakarta. *Jurnal Dinamika*, 2(2), 1–8. <https://doi.org/10.54895/dinamika.v2i2.1825>
- Rahayu, M. J., Mukaromah, H., & Mulyanto, M. (2024). Social capital-based strategy of sustainable village-owned enterprises (BUMDes) development. *International Journal of Social Economics*, 51(3), 297–312. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2022-0700>
- Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I. (2020). Peranan BUMDes dalam meningkatkan PADes : Survey pada Bumdes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 3(3), 90–97. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v3i3.517>
- Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I. (2021). Peranan KADes dalam meningkatkan kinerja BUMDes : Survey pada BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 4(1), 65–73. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v4i1.617>
- Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kinerja BUMDes: Survey pada BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2), 142–153.
- Sanjaya, P. K. A., Hartati, N. P. S., & Premayani, N. W. W. (2020). Pemberdayaan pengelola badan usaha milik desa (BUMDes) berdikari melalui implementasi digital marketing system. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 65–75. <https://doi.org/10.31960/caradde.v3i2.467>
- Sinlae, A. A. J., Nani, P. A., Amaral, M. A. L., Ketmoen, A., Tukan, G. D., & Ratumakin, P. A. K. L. (2023). Pelatihan digital marketing untuk penguatan kapasitas Bumdes Kecamatan Kupang Barat. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(1), 263–270. <https://doi.org/10.46306/jabb.v4i1>
- Sriyono, S., Soeprapto, A., & Nugroho, S. P. (2023). Accounting for community welfare: Uncovering the limitations of BUMDes governance in Indonesia. *The International Conference on Advance Research in Social and Economic Science*, 1, 47–55. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-048-0_6
- Suci, R. G., Azmi, Z., Marlina, E., Putri, A. A., Rodiah, S., & Azhari, I. P. (2021). Edukasi akuntansi dan peningkatan efektifitas pelaporan keuangan bumdes berbasis excel for accounting (EFA). *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 72–77. <https://doi.org/10.54951/comsep.v2i1.58>